

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – Buku

Ali Rido, 1986, “*Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*”, Penerbit Alumni, Bandung

Azizah, 2016, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, Setara Press, Malang

Bagir Manan, 2004, “*Hukum Positif Indonesia*”, FH UII Press, Yogyakarta

C.F.G. Sunarjati Hartono, Juni 1972, “*Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*”, Penerbit Binatjipta, Cetakan Pertama, Bandung

Edwards, 2003i, *Economist* 1995B:72, World Bank

Erman Rajagukguk, Januari 1985 “*Indonesianisasi Saham*”, PT Bina Aksara, Jakarta

Erman Rajagukguk, 2007, “*Hukum Investasi di Indonesia*”, Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta

Enid Campbell, et. al., 1988, “*Legal Research, Materials and Methods*”, The Law Book Company Limited, Sydney

H. Salim HS., 2012, “*Hukum Investasi di Indonesia*”, Rajawali Press, Jakarta

H.S. Kartadjoemena, 2000, “*Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*” Penerbit UI-Press

J.B. Daliyo *et al.*, 2001, “*Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*”, PT Prenhallindo: Percetakan Gloria, Jakarta

John H. Jackson, 1969, “*World Trade and the Law of GATT: a Legal Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade*”, Charlottesville Va: the Michie Company Law Publishers

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, “*Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*”, Kanisius, Yogyakarta

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, “*Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*”, Kanisius, Yogyakarta

- Maria SW. Sumardjono, 2014, "*Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*", Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap., 2009, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Sinar Grafika, Jakarta
- OECD, 2018, "*Enhancing the Legal Framework for Sustainable Investment, Project Insights*"
- Ridwan Khairandi, April 2014, Cetakan Pertama, "*Hukum Perseroan Terbatas*", FH UII Press, Yogyakarta
- RT. Sutantya R. Hadikusuma, Sumantoro, Februari 1996, Cetakan keempat, "*Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*", Rajawali Pers, Jakarta
- Subekti, 2003. "*Pokok-pokok Hukum Perdata*", Penerbit PT Intermasa, Cetakan XXXI, Jakarta
- Sumantoro, November 1984, "*Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*", Penerbit Bincipta, Cetakan Pertama
- Soerjono Soekanto, 2012, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*" Rajawali Pers, Jakarta
- Teguh Samudra, 2004, "*Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*", Penerbit Alumni, Bandung

2. Jurnal Hukum

APEC Non-Binding Investment Principles November 1994

Ahmad Muliadi, 2017, "*Applying Principles of Legal Certainty and Equal in the Implementation of Investment in Indonesia*", *European Research Studies Journal* Vol. XX, Issue 4A

Ana Natalia, 2016, "*Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*", *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*

Catherine Yannaca-Small, 2008, "*Definition of Investor and Investment in International Investment Agreements*", *International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations*, OECD

Gabriel R.G. Benito, September 22-23, 2003, “*Divestment Seen through the Lens of International Business Strategy*”, *Keynote Lecture Given at the International Conference on Divestment: Corporate Strategis*, Lisbon

Harm-Jan Steenhuis, Erik J. de Bruijn, 2009, “*International Divestment: an Overview and Analysis*”, *Submission 16217, Presented at Academy of Management*

Kuntana Magnar, Inna Junaenah, Ahmad Taufik, Februari 2010 “*Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)*”. Vol. 7, No. 1

Petra Bunawan, April 2, 2017 “*Foreign Investment in Indonesia: the Legal Aspects under the New Indonesian Investment Law*”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol. 8 No. 2

3. Website (on-line)

Doriani Lingga, 2012, “Memutus Lingkaran Setan Kemiskinan Melalui Pendidikan” (*on-line*), tersedia di:
<http://sospolinaction.blogspot.com/2012/10/memutus-lingkaran-setan-kemiskinan.html>

Farida Nugrahani, 2014, “Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa”, dapat ditemukan secara daring (*on-line*) melalui
<http://lppm.univetbantara.ac.id/data/materi/Buku.pdf>

Hukumonline, 16 Maret 2008, “Surat Edaran Bukan Peraturan Perundang-undangan” (*on-line*), tersedia di:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18765/surat-edaran-bukan-peraturan-perundangundangan/>

Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2020, dapat ditemukan secara daring (*on-line*)
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

Kliklegal, 18 Januari 2018, “Begini Penjelasan BKPM Soal Tidak Mewajibkan PMA untuk Divestasi Dalam Peraturan BKPM No. 13/2017” (*on-line*), tersedia di:
<https://kliklegal.com/begini-penjelasan-bkpm-soal-tidak-mewajibkan-pma-untuk-divestasi-dalam-peraturan-bkpm-no-132017/>

Pandi Pramuja, 2013, “Pendidikan Sebagai Jalan Keluar Dari Lingkaran Setan Kemiskinan” (*on-line*), tersedia di: http://koer2.blogspot.com/2013/01/tugas-3-pengantar-ekonomi-pembangunan_9.html

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818 dan perubahannya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394, dan perubahannya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran 3674

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, dan perubahannya,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan perubahannya

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membahas mengenai perubahan data perseroan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392, dan perubahannya

Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor B-1195/A/BKPM/X/1974

Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 821